



## **Program kredit ultra mikro dan kemiskinan di Jawa Tengah pada masa pandemi**

<sup>1,\*</sup>Suparjito

<sup>2</sup>Meilena Sarmilasari

<sup>3</sup>Lu'lu' Purwaningrum

<sup>1,2</sup> Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Jawa Tengah, Kemenkeu RI

<sup>3</sup> Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

\*Corresponding author: [jito.pdie.uns@gmail.com](mailto:jito.pdie.uns@gmail.com)

**Abstrak:** *This study focuses on the role of financing the ultra microprogram (UMi) to support government programs in poverty alleviation. There are two analyzes used: first descriptive analysis, which compares the number of micro-enterprises with the number of poor people in Central Java. Second, statistical analysis of Pearson correlation measures the correlation between the number of micro-entrepreneurs, the amount of ultra-micro credit financing disbursement, the number of poor people, and indicators related to poverty. The results of the descriptive analysis show that before the covid-19 pandemic, the average percentage of micro-enterprises and the number of poor people was 4.09 percent. In comparison, during the covid-19 pandemic, the average was 5.40 percent. Pearson correlation statistical analysis shows that the number of customers and the distribution of ultra-micro credit strongly correlate with the number of poor people. The number of poor people has a strong correlation with life expectancy and an average length of schooling. It has a reasonably strong correlation with other indicators related to poverty both before the 2019 COVID-19 pandemic and during the 2020 COVID-19 pandemic.*

**Keyword:** *Microfinance; Poverty; Pearson correlation; Ultra mikro*

### **1. Pendahuluan**

Di belahan dunia manapun, kemiskinan merupakan permasalahan yang masih terus menjadi perhatian untuk dicarikan jalan keluarnya. Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang berlimpah juga mengalami permasalahan terkait dengan kemiskinan ini. Persentase penduduk miskin di Indonesia masih berada di seputar angka 10% dalam 5 tahun terakhir. Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia juga mengalami hal yang sama, bahkan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2020 meningkat menjadi 11,84 % dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,80 %. Berikut ini angka kemiskinan di Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2016-2020.

**Tabel 1. Penduduk Miskin di Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

| Wilayah           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Prov. Jawa Tengah | 13,27 | 13,01 | 11,32 | 10,80 | 11,84 |
| Indonesia         | 10,86 | 10,64 | 9,82  | 9,41  | 10,19 |

Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka (2021)

Angka kemiskinan yang berada di kisaran 10 % ini tentunya memerlukan kebijakan dari pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan pelaku usaha serta masyarakat untuk mengurangi dan menekan angka kemiskinan menjadi serendah mungkin dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Diantara kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Pusat dalam menanggulangi kemiskinan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Salah satu strategi percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut dilakukan dengan cara mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil.

Pemerintah mengatur lebih lanjut kebijakan pemberdayaan ultra mikro tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro yang diubah lebih lanjut menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Peraturan Menteri Keuangan tentang pembiayaan ultra mikro ini merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian usaha dengan target sasaran para pelaku usaha mikro yang berada di lapisan terbawah serta belum dapat mengakses fasilitas pembiayaan perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemberian UMi diharapkan mampu berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, terutama dengan adanya pandemi covid-19 yang berdampak signifikan terhadap kenaikan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Selain itu, dengan adanya pembiayaan UMi dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat terutama pelaku usaha mikro baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data penyaluran kredit ultra mikro, jumlah kemiskinan, rata-rata pengeluaran perkapita, rata-rata pengeluaran perkapita makanan dan rata-rata pengeluaran perkapita bukan makanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai korelasi antara penyaluran kredit UMi dengan jumlah kemiskinan, kemiskinan dengan jumlah rata-rata pengeluaran perkapita, kemiskinan dengan jumlah rata-rata pengeluaran perkapita makanan, dan kemiskinan dengan jumlah rata-rata pengeluaran perkapita bukan makanan sebelum dan selama pandemi covid-19 di Provinsi Jawa Tengah.

## **2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.1. Kemiskinan**

Tujuan utama dan ukuran dalam pembangunan menurut *United Nation Development Program* (UNDP, 2006) adalah berkurangnya tingkat kemiskinan dan keberhasilan dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan. [Spicker \(2007\)](#) membuat

kategori kemiskinan menjadi tiga kategori besar, yaitu kondisi material, posisi ekonomi dan posisi sosial. Ketiga konsep kemiskinan tersebut disarikan dari berbagai pendapat para ahli serta konsep kemiskinan yang memiliki berbagai makna yang berbeda. Kategori pertama yang menyatakan bahwa kemiskinan terkait dengan konsep material mengandung makna bahwa masyarakat menjadi miskin karena tidak memiliki sesuatu yang dibutuhkan atau tidak memiliki sumber daya untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan tersebut. Dalam hal ini kemiskinan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kondisi kekurangan material, baik itu berupa barang atau layanan yang dibutuhkannya. Kategori kedua menyatakan bahwa konsep kemiskinan berkaitan erat dengan posisi ekonomi yang mengandung makna bahwa tingkat pendapatan sering digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur kemiskinan. Atau dengan kata lain dapat didefinisikan bahwa kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang rendah. Kategori ketiga menyatakan bahwa konsep kemiskinan berkaitan erat dengan kondisi sosial. Dalam hal ini terdapat kelas masyarakat miskin yang ditentukan berdasarkan posisi ekonomi, peran sosial dan pekerjaannya. Kelas masyarakat miskin ini dijadikan sebagai obyek penerima manfaat sosial sebagai konsekuensi atas kekurangan sarana yang mereka miliki (Spicker, 2007).

Bank Dunia membuat kriteria ukuran kemiskinan yang banyak digunakan oleh negara-negara berkembang yaitu ukuran kemiskinan absolut. Ukuran kemiskinan absolut ini dibuat berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh masyarakat, dan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi serta menjadi acuan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur tingkat kemiskinan (Musiyam, 1992).

Ukuran kemiskinan absolut ini mendapatkan banyak kritikan dari para ahli ekonomi, dan pada tahun 1990-an, *United Nation Development Programme* (UNDP) dibawah kepemimpinan Mahbub Ul Haq, seorang ekonom berkebangsaan Pakistan memperkenalkan ukuran kemiskinan melalui pendekatan *Human Development* yang dibuat dalam bentuk formula Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Inndex*) dan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index*). Pendekatan ukuran kemiskinan yang digunakan oleh UNDP lebih komprehensif dibandingkan ukuran kemiskinan absolut yang dibuat oleh Bank Dunia. UNDP memberikan ukuran kemiskinan bukan hanya berdasarkan pendekatan ekonomi semata, melainkan juga menggunakan pendekatan pendidikan (angka melek huruf), dan pendekatan Kesehatan yaitu angka harapan hidup (Suryawati, 2005).

Suparlan (1995) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan kondisi suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu standar hidup yang berada pada tingkatan kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku umum di masyarakat yang bersangkutan. Standar hidup yang rendah ini secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan harga diri bagi mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Pendiri penelitian kemiskinan modern, Charles Both dan Seebom Rowntree dalam [Lister \(2010\)](#) berpendapat bahwa seseorang dikatakan miskin jika tidak memiliki kemampuan minimum untuk mempertahankan hidupnya, seperti pemenuhan kebutuhan akan makanan, perumahan dan pakaian. Pendapat ini mendukung kelompok para ahli yang menggunakan pendekatan ukuran kemiskinan absolut. [Saunders \(2005\)](#) menyatakan bahwa pembahasan mengenai kemiskinan absolut ini tidak akan terlepas dari permasalahan batas kemiskinan dan garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini merupakan pedoman baku yang telah disepakati untuk dijadikan standar dalam penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kemiskinan serta digunakan sebagai alat komunikasi dengan para pengambil kebijakan serta masyarakat umum, namun hal ini belum bisa memberikan gambaran secara menyeluruh tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan serta hambatan yang dihadapi dalam rangka menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat kelompok miskin dalam kehidupannya.

Townsend, salah satu tokoh yang memulai studi kemiskinan di Inggris menyatakan bahwa kelompok miskin adalah mereka yang dikucilkan dari pergaulan, terisolasi, tersembunyi dan diabaikan. Definisi kemiskinan relatif yang paling lengkap menurut Townsend terdapat dalam karyanya yang berjudul "*Poverty in The United Kingdom*". Menurut Townsend, kemiskinan merupakan kondisi dimana individu, keluarga, dan kelompok dalam populasi kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diantaranya kebutuhan untuk mendapatkan makanan, serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dengan fasilitas yang memadai ([Lister, 2010](#)).

[Musiyan \(1992\)](#) menyampaikan pandangannya tentang ukuran kemiskinan relatif sebagai persoalan struktural. Dalam hal ini ukuran kemiskinan ditentukan oleh ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sosial per kapita. Pendekatan ukuran kemiskinan relatif ini bertumpu pada perbandingan distribusi kebutuhan nyata per kapita terhadap setiap sumber daya yang dimiliki oleh suatu masyarakat kemudian diperbandingkan dengan masyarakat lainnya. Sedangkan [Spicker \(2014\)](#) berpendapat bahwa ukuran kemiskinan relatif merupakan suatu ukuran perbandingan antara masyarakat miskin dengan individu lainnya.

Pada perkembangan lebih lanjut, BPS (2018) menggunakan konsep kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai ukuran tingkat kemiskinan. Dalam hal ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Para ahli dan pembuat kebijakan masih belum satu kata dalam hal pembahasan tentang faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Terdapat dua kubu yang berbeda pandangan terhadap penyebab terjadinya kemiskinan, kubu pertama mendukung pendapat bahwa penyebab kemiskinan adalah kultural atau tingkah laku masyarakat, sedangkan kubu kedua mendukung pendapat bahwa penyebab kemiskinan adalah structural atau ekonomi ([Jordan, 2004](#)). Sedangkan beberapa ahli lainnya berpandangan bahwa secara garis besar, kemiskinan merupakan ketidaksesuaian hasil tindakan individu di masyarakat yang

membuat individu tersebut berada dalam kondisi yang lemah secara ekonomi, kekurangan dalam etos kerja dan tertinggal dibandingkan dengan masyarakat konvensional lainnya (Jordan, 2004).

## **2.2. Kredit**

Definisi kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Definisi lain tentang kredit ini disampaikan oleh Hasibuan (2017) yang menyatakan bahwa kredit merupakan semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh si peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan tujuan pemberian kredit adalah menggerakkan roda perekonomian dimasyarakat sehingga terjadi peningkatan kegiatan ekonomi yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja dan pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

## **2.3. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa artikel yang menjadi landasan penelitian, diantaranya Suriadi, Hailuddin & Sriningsih (2021) melakukan penelitian tentang model pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mengurai kemiskinan di Kota Mataram. Dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) diperoleh kesimpulan bahwa Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kota Mataram harus memiliki lokasi yang strategis dan didukung adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh lembaga keuangan mikro syariah. Diperlukan lebih banyak sosialisasi tentang keberadaan lembaga keuangan syariah dengan target garapan pasar mikro serta strategi kebijakan lembaga keuangan mikro syariah dalam menghadapi berbagai tantangan dan pengembangan diri secara kreatif, inovatif dan senantiasa memberikan layanan yang terbaik terhadap nasabah.

Hati (2020) melakukan penelitian atas program pemberdayaan ekonomi untuk menanggulangi masalah kemiskinan perkotaan dengan studi kasus pada salah satu kelurahan di DKI Jakarta yang memiliki ranking tertinggi kategori tidak berhasil. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketidakberhasilan program pemberdayaan ekonomi dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan perkotaan disebabkan oleh faktor manusia dan sosial, faktor non manusia dan sosial, serta faktor penerapan kebijakan dan program yang masih memberikan ruang gerak bagi manusia untuk berperilaku negatif, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, bukan hanya sekedar pada peningkatan jumlah modal ekonominya saja.

Adams & Atmanti (2021) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan di 6 Provinsi di Pulau Jawa. Dengan menggunakan pendekatan analisis statistik deskriptif dan regresi data panel diperoleh hasil penelitian bahwa Indeks Penetrasi Perbankan dan PDRB berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, Indeks Ketersediaan Jasa Perbankan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kemiskinan, Indeks Penggunaan Jasa Perbankan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, Inflasi berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Setyawan & Iswanaji (2021) melakukan penelitian tentang peran *Baitul Maal Wattamwil* sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Magelang. Dengan menggunakan pendekatan analisis regresi linier sederhana diperoleh hasil penelitian bahwa pembiayaan tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan para pelaku usaha yang menjadi debitur BMT Bima Magelang. BMT Bima Magelang juga memiliki peran yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang berasal dari dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf.

Saleh & Hidayat (2011) melakukan penelitian melalui pendekatan hasil kajian literatur tentang strategi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam mendukung pengentasan kemiskinan di pedesaan. Hasil kajian literturnya menuju pada kesimpulan bahwa pengembangan LKM dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Tambunan (2012) melakukan penelitian tentang peran usaha mikro dan kecil dalam pengentasan kemiskinan di daerah dengan menggunakan data tahun 2010 tentang kemiskinan dan UMK pada sektor industri manufaktur pada tingkat provinsi di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil (UMK) penting perannya bagi pengurangan kemiskinan di daerah (provinsi), namun perannya di setiap provinsi berbeda karena adanya perbedaan dalam akses UMK ke input-input penting diantaranya pendidikan, bantuan teknis, bahan baku dan permodalan.

Rahayu (2018) melakukan penelitian tentang kemiskinan dan keuangan mikro melalui pendekatan kajian literatur dari berbagai negara. Hasil penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa keuangan mikro mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Namun terdapat Sebagian kecil hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keuangan mikro tidak mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Tentang strategi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam mendukung pengentasan kemiskinan di pedesaan. Hasil kajian literturnya menuju pada kesimpulan bahwa pengembangan LKM dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

### **3. Metode Penelitian**

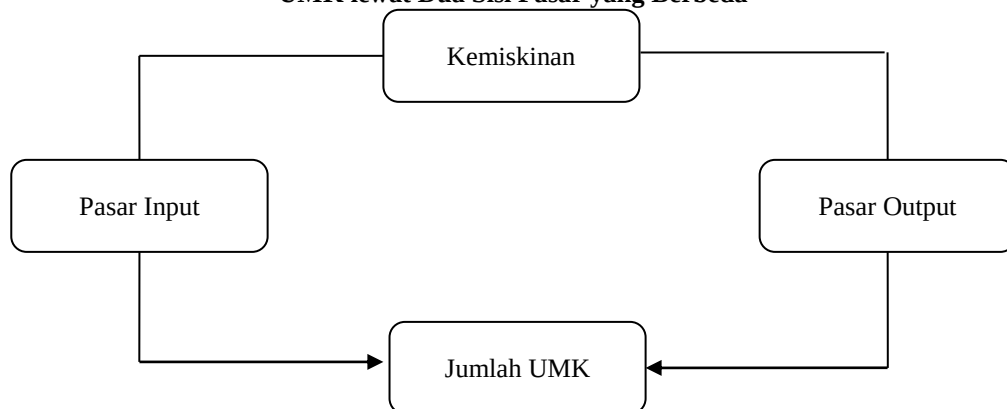
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan penyaluran pembiayaan ultra mikro dan kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode tahun 2019 sampai dengan 2020. Data dibagi dalam 2 kelompok yaitu data sebelum pandemi covid-19 tahun 2019 dan data selama masa pandemi covid-19 tahun 2020. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi pelaku usaha ultra mikro yang telah terdaftar dan memperoleh pinjaman kredit ultra mikro di wilayah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Data yang digunakan merupakan data yang

bersumber dari Lembaga resmi pemerintah, yaitu data dari Badan Pusat Statistik yang berupa data tentang kemiskinan dan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berupa data penyaluran kredit ultra mikro di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

### 3.1. Kerangka Pemikiran

Merujuk pendapat [Tambunan \(2012\)](#) bahwa hubungan antara kemiskinan dan keberadaan/pertumbuhan usaha mikro kecil dapat dilihat dari dua sisi pasar seperti gambar 1.

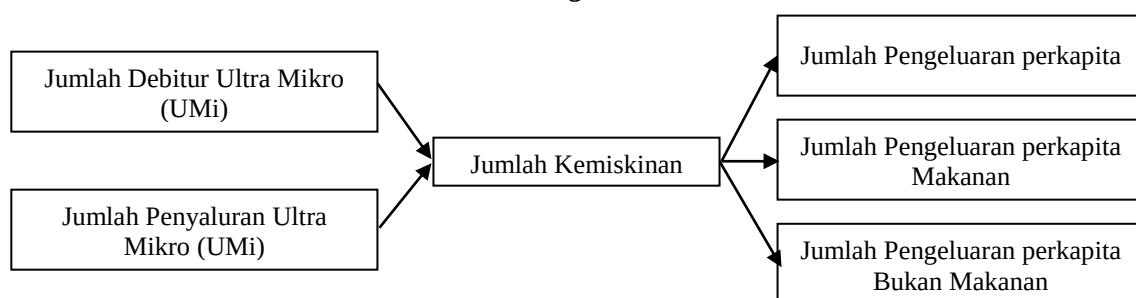
**Gambar 1. Hubungan antara Kemiskinan dan Keberadaan/Pertumbuhan UMK lewat Dua Sisi Pasar yang Berbeda**



Sumber: Tambunan (2012)

Jika dilihat dari sisi pasar *input*, kemiskinan dapat disebabkan karena banyaknya pengangguran, ataupun pekerja harian dengan jumlah upah yang rendah. Hal ini mendorong banyak orang untuk menambah penghasilan dengan membuka usaha sendiri meskipun dalam kondisi keterbatasan yang ada baik keterbatasan dalam bentuk modal yang dimiliki maupun keterbatasan ilmu pengetahuannya, sehingga tidak mampu untuk membuka usaha yang lebih besar dan kompleks. Sedangkan dari sisi pasar *output*, kemampuan daya beli masyarakat miskin yang rendah direspon oleh para pelaku usaha mikro kecil untuk memproduksi barang dan jasa dengan harga yang murah dan terjangkau bagi masyarakat yang masuk dalam kategori kelompok miskin. Dalam hal ini, bertambahnya jumlah pelaku UMK karena adanya factor penarik, yaitu permintaan konsumen dari masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah untuk mengkonsumsi barang dan jasa dengan harga yang terjangkau.

**Gambar 2. Kerangka Teoritis Penelitian**





Berdasarkan pendapat [Tambunan \(2012\)](#) tersebut diatas, kemudian dielaborasi lebih lanjut untuk melakukan penelitian tentang korelasi penyaluran kredit UMi dengan kemiskinan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebelum masa pandemic covid-19 tahun 2019 dan selama pandemic covid-19 tahun 2020. Berdasarkan kerangka teoritis penelitian ini, hal yang diungkap adalah korelasi antara penyaluran kredit ultra mikro dengan kemiskinan, angka melek huruf, angka harapan hidup, belanja pangan dan belanja non-pangan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

### **3.2. Metode Pearson Correllation**

Metode Pearson Korelasi atau *Prooduct Moment Pearson* merupakan metode statistika yang digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan kekuatan hubungan suatu variable dengan variabel lainnya ([Sekaran, 2010](#)). Nilai korelasi ( $r$ ) berkisar antara 1 sampai dengan -1, dengan penjelasan sebagai berikut;

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nilai koefisien 0                  | : Tidak ada hubungan sama sekali (jarang terjadi) |
| Nilai koefisien 1                  | : Hubungan sempurna (jarang terjadi)              |
| Nilai koefisien $>0$ s.d. $< 0,2$  | : Hubungan sangat lemah                           |
| Nilai koefisien $0,2$ s.d. $< 0,4$ | : Hubungan lemah                                  |
| Nilai koefisien $0,4$ s.d. $< 0,6$ | : Hubungan cukup kuat                             |
| Nilai koefisien $0,6$ s.d. $< 0,8$ | : Hubungan kuat                                   |
| Nilai koefisien $0,8$ s.d. $< 1$   | : Hubungan sangat kuat                            |

Sedangkan nilai negatif berarti menentukan arah hubungan variabel yang diperhitungkan nilai korelasinya.

### **3.3. Analisis Dreskriptif**

Analisis deskriptif merupakan analisis statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi ([Sugiyono, 2010](#)).

## **4. Hasil Penelitian**

[Weil \(2013\)](#) berpendapat bahwa terdapat 3 kegiatan investasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan, diantaranya: 1) program-program *social protection* atau *social safety net*, termasuk *conditional* ataupun *unconditional cash transfer* bagi orang miskin; 2) program-program *asset-building* atau *match-saving*, yang ditujukan bagi individu maupun rumah tangga yang berpenghasilan rendah untuk menabung dan memiliki asset, baik itu berupa rumah, usaha, pendidikan, maupun tabungan yang diperuntukkan sebagai persiapan masa pensiun nantinya; 3) *microfinance*, atau pemberian akses layanan keuangan bagi individu ataupun rumah tangga yang berpenghasilan rendah namun tidak dapat mengakses pembiayaan perbankan ataupun pelayanan sejenis lainnya. Artinya *microfinance* ini merupakan salah satu instrumen yang dapat ditempuh guna menanggulangi masalah kemiskinan, yang jika kita terjemahkan dalam pelaksanaan di Indonesia adalah kredit program pembiayaan ultra mikro.

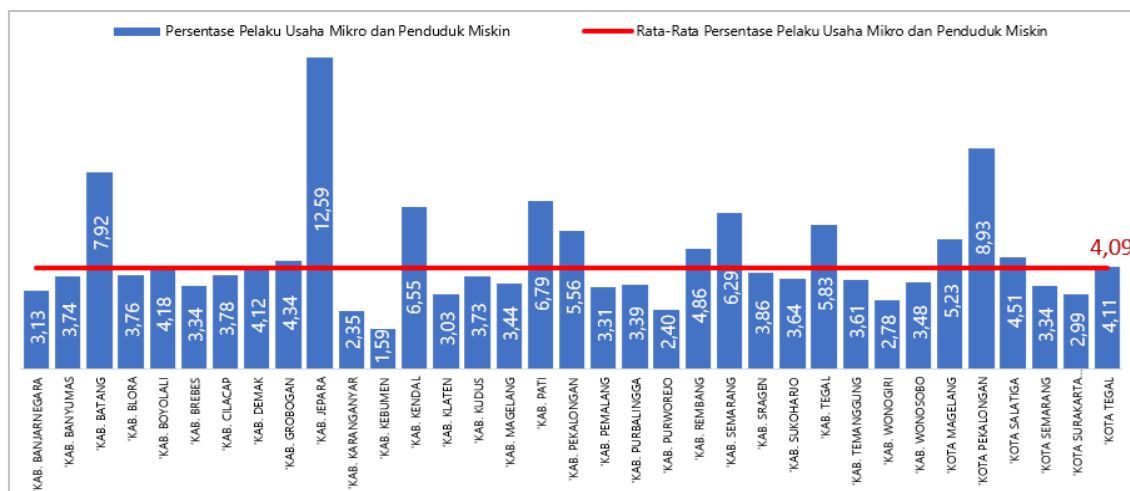


Berdasarkan data kemiskinan dan jumlah penyaluran kredit ultra mikro kepada para debitur pelaku usaha ultra mikro diseluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dan 2020, dapat dilakukan analisa deskriptif keterkaitan antara kemiskinan dan pelaku usaha ultra mikro sebagai penerima kredit *microfinance* ini sebelum pandemi covid-19 di tahun 2019 dan selama pandemi covid-19 di tahun 2020.

Berdasarkan data BPS, sebelum pandemi covid-19 melanda Indonesia, rata-rata kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2019 adalah sebesar 10,8 %, dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Kebumen yaitu sebesar 16,82 %, dan Kota Semarang memiliki tingkat kemiskinan paling kecil yaitu sebesar 3,98 %. Tingkat persentase rata-rata pelaku usaha mikro dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2019 adalah 4,09 %, dan Kabupaten Jepara merupakan Kabupaten dengan nilai persentase rata-rata pelaku usaha mikro dibandingkan dengan penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 12,59 %, sedangkan Kabupaten Kebumen persentasenya paling rendah hanya sebesar 1,59%.

Kabupaten/Kota yang memiliki persentase pelaku usaha mikro dibandingkan dengan penduduk miskin diatas rata-rata se-Jawa Tengah diantaranya Kabupaten Batang 7,92 %, Kabupaten Boyolali 4,18 %, Kabupaten Demak 4,12 %, Kabupaten Grobogan 4,34 %, Kabupaten Jepara 12,59 %, Kabupaten Kendal 6,55 %, Kabupaten Pati 6,79 %, Kabupaten Pekalongan 5,56 %, Kabupaten Rembang 4,86 %, Kabupaten Semarang 6,29 %, Kabupaten Tegal 5,83 %, Kota Magelang 5,23 %, Kota Pekalongan 8,93 %, Kota Salatiga 4,51 %, Kota Tegal 4,11 %, Sedangkan sisanya 20 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki persentase pelaku usaha mikro dibandingkan dengan penduduk miskin dibawah 4,09 % (dibawah rata-rata se-Jawa Tengah). Fenomena ini merupakan tantangan bersama untuk dapat dicarikan solusi alternatif, terutama bagi wilayah yang tingkat kemiskinannya tinggi, namun pelaku usaha mikronya sedikit.

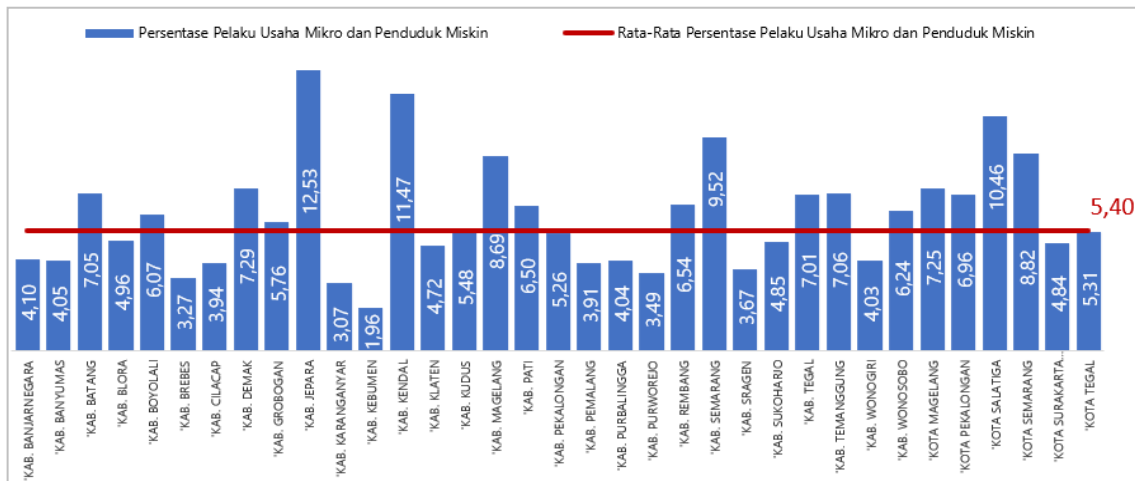
**Grafik 1.**  
**Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Penduduk Miskin**  
**di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2019**



Sumber : BPS dan SIKP Ultra Mikro (2021)

Setelah pandemi covid-19 melanda Indonesia mulai Maret 2020, kemiskinan meningkat jika dibandingkan tahun 2019 menjadi sebesar 11,41 %. Tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen tetap yang tertinggi dan meningkat menjadi 17,59 %, sedangkan Kota Semarang tingkat kemiskinannya tetap yang paling kecil, namun meningkat menjadi 4,34 %. Tingkat persentase rata-rata pelaku usaha mikro dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2020 meningkat jika dibandingkan tahun 2019 yaitu menjadi 5,40 %, dan Kabupaten Jepara tetap menjadi Kabupaten dengan nilai persentase rata-rata pelaku usaha mikro dibandingkan dengan penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 12,53 %, sedangkan Kabupaten Kebumen persentasenya paling rendah namun sedikit meningkat persentasenya menjadi sebesar 1,96 %.

**Grafik 2.**  
**Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Penduduk Miskin**  
**di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2020**



Sumber: BPS dan SIKP Ultra Mikro (2021)

Kabupaten/Kota yang memiliki persentase pelaku usaha mikro dibandingkan dengan penduduk miskin diatas rata-rata se-Jawa Tengah pada tahun 2020 diantaranya Kabupaten Batang 7,05 %, Kabupaten Boyolali 6,07 %, Kabupaten Demak 7,29 %, Kabupaten Grobogan 5,76 %, Kabupaten Jepara 12,53 %, Kabupaten Kendal 11,47 %, Kabupaten Kudus 5,48 %, Kabupaten Magelang 8,69 %, Kabupaten Pati 6,50 %, Kabupaten Rembang 6,54 %, Kabupaten Semarang 9,52 %, Kabupaten Tegal 7,01 %, Kabupaten Temanggung 7,06 %, Kabupaten Wonosobo 6,24 %, Kota Magelang 7,25 %, Kota Pekalongan 6,96 %, Kota Salatiga 10,46 %, Kota Semarang 8,82 %.

Sedangkan sisanya 17 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki persentase pelaku usaha mikro dibandingkan dengan penduduk miskin dibawah 5,40 % (dibawah rata-rata se-Jawa Tengah). Fenomena ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Tambunan sebagaimana disebutkan diawal bahwa jika kemiskinan di suatu wilayah tinggi, maka akan diikuti oleh bertambahnya pelaku usaha mikro yang akan memproduksi barang/jasa dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat miskin didaerah tersebut, yang pada tahap

selanjutnya akan mampu memberikan dampak perubahan perbaikan ekonomi bagi pelaku usaha mikro yang bersangkutan.

## 5. Pembahasan

### 5.1. Masa Sebelum Pandemi Covid-19 Tahun 2019

Sebelum pandemi covid-19 melanda Indonesia, nilai *pearson correlation* antar variabel dalam penelitian dapat terlihat dalam tabel 2.

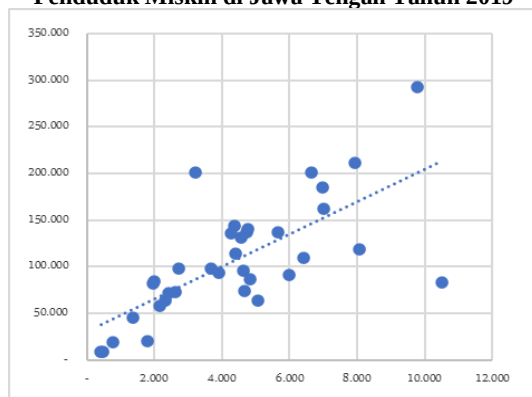
**Tabel 2. Nilai Pearson Correlation antar Variabel Penelitian Tahun 2019**

| Hubungan Antar Variabel                                             | Nilai Korelasi | Ket.       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Jumlah Pelaku Usaha Ultra Mikro & Jumlah Penduduk Miskin            | 0,65           | Kuat       |
| Jumlah Penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) & Jumlah Penduduk Miskin | 0,70           | Kuat       |
| Jumlah Penduduk Miskin & Pengeluaran Per Kapita                     | -0,53          | Cukup Kuat |
| Jumlah Penduduk Miskin & Pengeluaran Per Kapita (Pangan)            | -0,40          | Cukup Kuat |
| JumlahPenduduk Miskin & Pengeluaran Per Kapita (Non Pangan)         | -0,53          | Cukup Kuat |

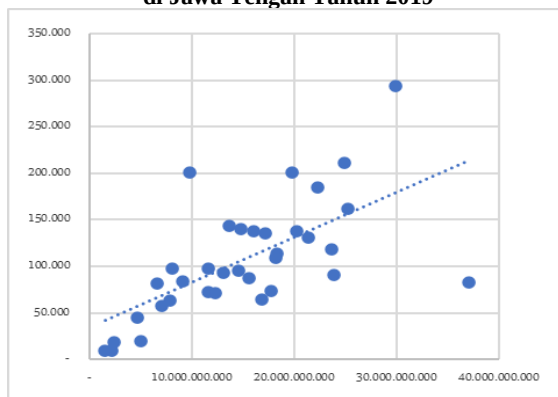
Sumber: BPS, diolah (2021)

Berdasarkan nilai hasil perhitungan *person correlation* dapat diketahui bahwa jumlah pelaku usaha mikro (debitur ultra mikro) dan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah memiliki hubungan yang kuat yaitu 0,65, artinya perkembangan jumlah pelaku usaha mikro berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin, semakin banyak jumlah penduduk miskin semakin bertambah jumlah pelaku usaha ultra mikronya. Sebagai pendukung informasi hasil perhitungan *pearson correlation* antara jumlah pelaku usaha mikro (debitur ultra mikro) dan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, dibuat dalam bentuk gambar *scatterplot* sebaran titik kombinasi dua variabel (Gambar 3).

**Gambar 3.**  
Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Pelaku Usaha Mikro (Debitur Ultra Mikro) dengan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2019



**Gambar 4.**  
Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Penyaluran Kredit Ultra Mikro dengan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2019



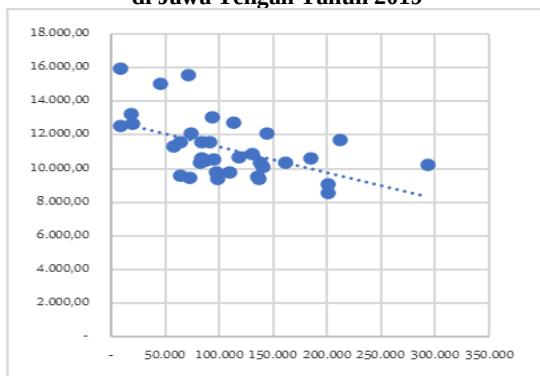
Sumber: BPS dan SIKP (2021)

Hasil perhitungan *Pearson Correlation* antara jumlah penyaluran kredit ultra mikro dan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang kuat yaitu 0,70, artinya perkembangan penyaluran kredit ultra mikro berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin, semakin banyak jumlah penduduk miskin semakin bertambah jumlah pelaku usaha ultra mikronya serta bertambah pula jumlah penyaluran kredit ultra mikro

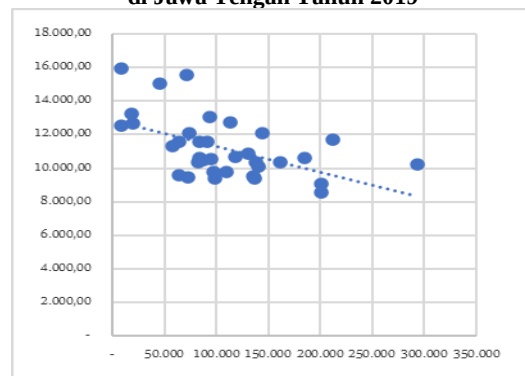
kepada para pelaku usahanya. Sebagai pendukung informasi hasil perhitungan *pearson correlation* antara jumlah penyaluran kredit ultra mikro dan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, dibuat dalam bentuk gambar *scatterplot* sebaran titik kombinasi dua variabel (Gambar 4).

Hasil perhitungan *Pearson Correlation* antara jumlah penduduk miskin dan jumlah pengeluaran per kapita penduduk di Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang cukup kuat yaitu -0,53, artinya perkembangan jumlah penduduk miskin berbanding terbalik dengan jumlah pengeluaran per kapita, semakin banyak jumlah penduduk miskin semakin kecil pengeluaran per kapita penduduk di Jawa Tengah. Sebagai pendukung informasi hasil perhitungan *pearson correlation* antara jumlah penduduk miskin dan jumlah pengeluaran per kapita di Jawa Tengah, dibuat dalam bentuk gambar *scatterplot* sebaran titik kombinasi dua variabel tersebut (Gambar 5).

**Gambar 5**  
**Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Penduduk Miskin dengan Jumlah Pengeluaran Perkapita di Jawa Tengah Tahun 2019**



**Gambar 6.**  
**Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Penduduk Miskin dengan Jumlah Pengeluaran Perkapita di Jawa Tengah Tahun 2019**



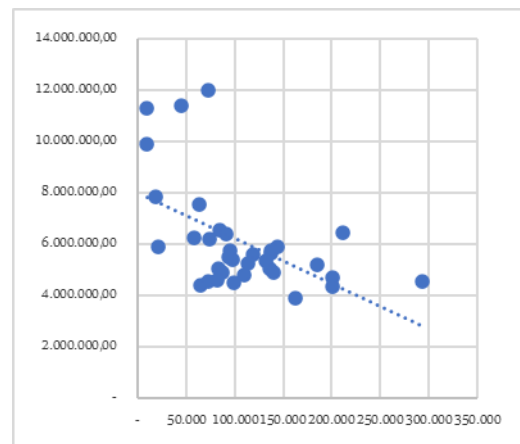
Sumber: BPS dan SIKP (2021)

Hasil perhitungan *Pearson Correlation* antara jumlah penduduk miskin dan jumlah pengeluaran per kapita makanan penduduk di Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang cukup kuat yaitu -0,40, artinya perkembangan jumlah penduduk miskin berbanding terbalik dengan jumlah pengeluaran per kapita makanan, semakin banyak jumlah penduduk miskin semakin kecil pengeluaran per kapita makanan penduduk di Jawa Tengah. Sebagai pendukung informasi hasil perhitungan *pearson correlation* antara jumlah penduduk miskin dan jumlah pengeluaran per kapita makanan penduduk di Jawa Tengah, dibuat dalam bentuk gambar *scatterplot* sebaran titik kombinasi dua variabel tersebut (Gambar 6).

Hasil perhitungan *Pearson Correlation* antara jumlah penduduk miskin dan jumlah pengeluaran per kapita bukan makanan penduduk di Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang cukup kuat yaitu -0,53, artinya perkembangan jumlah penduduk miskin berbanding terbalik dengan jumlah pengeluaran per kapita bukan makanan, semakin banyak jumlah penduduk miskin semakin kecil pengeluaran per kapita bukan makanan penduduk di Jawa Tengah. Sebagai pendukung informasi hasil perhitungan *pearson correlation* antara jumlah

penduduk miskin dan jumlah pengeluaran per kapita bukan makanan penduduk di Jawa Tengah, dibuat dalam bentuk gambar *scatterplot* sebaran titik kombinasi dua variabel tersebut (Gambar 7).

**Gambar 7**  
**Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Penduduk Miskin dengan Jumlah Pengeluaran Perkapita Bukan Makanan di Jawa Tengah Tahun 2019**



Sumber: BPS dan SIKP (2021)

## 5.2. Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020

Selama masa pandemi covid-19 melanda Indonesia pada awal tahun 2020, nilai perhitungan *pearson correlation* antar variabel dalam penelitian dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3. Nilai *Pearson Correlation* antar Variabel Penelitian Tahun 2020**

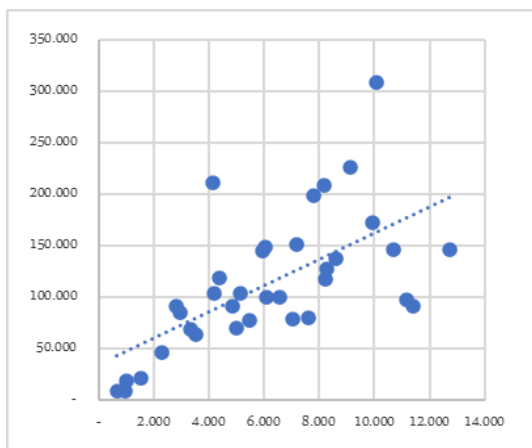
| Hubungan Antar Variabel                                             | Nilai Korelasi | Ket.       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Jumlah Pelaku Usaha Ultra Mikro & Jumlah Penduduk Miskin            | 0,62           | Kuat       |
| Jumlah Penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) & Jumlah Penduduk Miskin | 0,63           | Kuat       |
| Jumlah Penduduk Miskin & Pengeluaran Per Kapita                     | -0,52          | Cukup Kuat |
| Jumlah Penduduk Miskin & Pengeluaran Per Kapita (Pangan)            | -0,44          | Cukup Kuat |
| Jumlah Penduduk Miskin & Pengeluaran Per Kapita (Non Pangan)        | -0,55          | Cukup Kuat |

Sumber: BPS, diolah (2021)

Berdasarkan nilai hasil perhitungan *person correlation* dapat diketahui bahwa jumlah pelaku usaha mikro (debitur ultra mikro) dan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah memiliki hubungan yang kuat yaitu 0,62, artinya perkembangan jumlah pelaku usaha mikro berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin, semakin banyak jumlah penduduk miskin semakin bertambah jumlah pelaku usaha ultra mikronya. Sebagai pendukung informasi hasil perhitungan *pearson correlation* antara jumlah pelaku usaha mikro (debitur ultra mikro) dan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, dibuat dalam bentuk gambar *scatterplot* sebaran titik kombinasi dua variabel (Gambar 8).

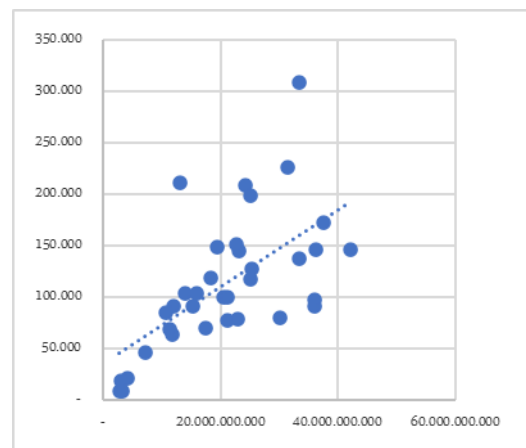
Hasil perhitungan *Pearson Correlation* antara jumlah penyaluran kredit ultra mikro dan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang kuat yaitu 0,63, artinya perkembangan penyaluran kredit ultra mikro berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin, semakin banyak jumlah penduduk miskin semakin bertambah jumlah pelaku usaha ultra mikronya serta bertambah pula jumlah penyaluran kredit ultra mikro kepada para pelaku usahanya. Sebagai pendukung informasi hasil perhitungan *pearson correlation* antara jumlah penyaluran kredit ultra mikro dan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, dibuat dalam bentuk gambar *scatterplot* sebaran titik kombinasi dua variabel (Gambar 9).

**Gambar 8.**  
**Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Pelaku Usaha Mikro (Debitur Ultra Mikro) dengan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2020**



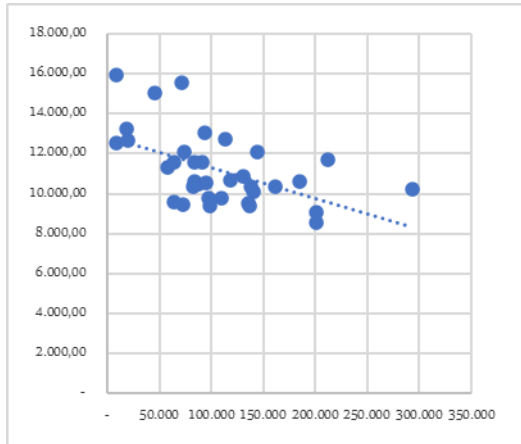
Sumber: BPS dan SIKP (2021)

**Gambar 9.**  
**Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Penyaluran Kredit Ultra Mikro dengan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2020**

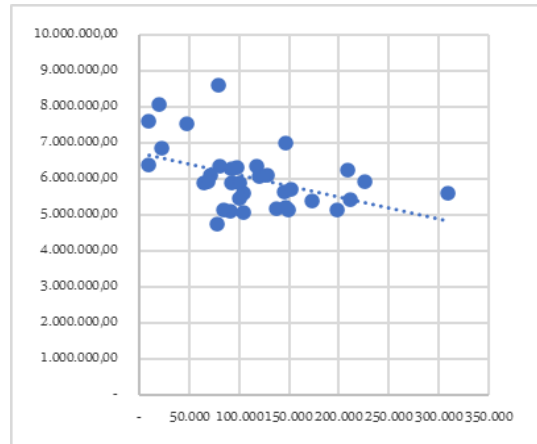


Hasil perhitungan *Pearson Correlation* antara jumlah penduduk miskin dan jumlah pengeluaran per kapita penduduk di Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang cukup kuat yaitu -0,52, artinya perkembangan jumlah penduduk miskin berbanding terbalik dengan jumlah pengeluaran per kapita penduduk di Jawa Tengah. Sebagai pendukung informasi hasil perhitungan *pearson correlation* antara jumlah penduduk miskin dan jumlah pengeluaran per kapita di Jawa Tengah, dibuat dalam bentuk gambar *scatterplot* sebaran titik kombinasi dua variabel tersebut (Gambar 10). Hasil perhitungan *Pearson Correlation* antara jumlah penduduk miskin dan jumlah pengeluaran per kapita makanan penduduk di Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang cukup kuat yaitu -0,44, artinya perkembangan jumlah penduduk miskin berbanding terbalik dengan jumlah pengeluaran per kapita makanan, semakin banyak jumlah penduduk miskin semakin kecil pengeluaran per kapita makanan penduduk di Jawa Tengah. Sebagai pendukung informasi hasil perhitungan *pearson correlation* antara jumlah penduduk miskin dan jumlah pengeluaran per kapita makanan penduduk di Jawa Tengah, dibuat dalam bentuk gambar *scatterplot* sebaran titik kombinasi dua variabel tersebut (Gambar 11).

**Gambar 10.**  
**Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Penduduk Miskin dengan Jumlah Pengeluaran Perkapita di Jawa Tengah Tahun 2020**

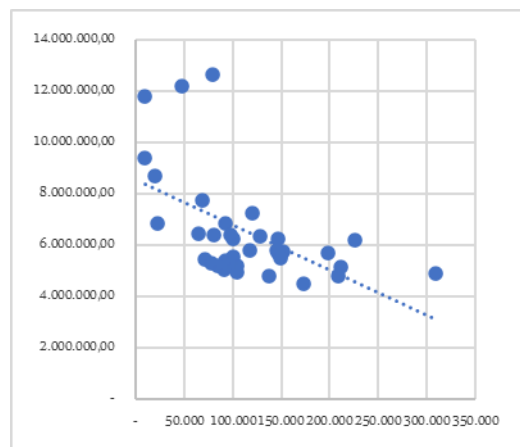


**Gambar 11.**  
**Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Penduduk Miskin dengan Jumlah Pengeluaran Per Kapita Makanan di Jawa Tengah Tahun 2020**



Sumber: BPS dan SIKP (2021)

**Gambar 12.**  
**Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Penduduk Miskin dengan Jumlah Pengeluaran Perkapita Bukan Makanan di Jawa Tengah Tahun 2020**



Sumber: BPS dan SIKP (2021)

Hasil perhitungan *Pearson Correlation* antara jumlah penduduk miskin dan jumlah pengeluaran per kapita bukan makanan penduduk di Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang cukup kuat yaitu -0,55, artinya perkembangan jumlah penduduk miskin berbanding terbalik dengan jumlah pengeluaran per kapita bukan makanan, semakin banyak jumlah penduduk miskin semakin kecil pengeluaran per kapita bukan makanan penduduk di Jawa Tengah. Sebagai pendukung informasi hasil perhitungan *pearson correlation* antara jumlah penduduk miskin dan jumlah pengeluaran per kapita bukan makanan penduduk di Jawa



Tengah, dibuat dalam bentuk gambar *scatterplot* sebaran titik kombinasi dua variabel tersebut (Gambar 12).

## **6. Batasan Penelitian & Saran Penelitian Masa Depan**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka penelitian yang kemudian diadakan pengujian mengenai korelasi antara pembiayaan UMi terhadap jumlah kemiskinan, yang meliputi variabel Pengeluaran Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita Makanan dan Pengeluaran Per Kapita Bukan Makanan dengan menggunakan pendekatan *person correlation*. Selanjutnya untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan analisis regresi untuk mengetahui dampak pertumbuhan jumlah debitur kredit ultra mikro (UMi) dan penyaluran kredit ultra mikro terhadap jumlah kemiskinan serta dampak lebih lanjut terhadap pengeluaran per kapita, pengeluaran per kapita makanan dan pengeluaran bukan makanan di kabupaten/kota se-Jawa Tengah, sehingga dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah debitur kredit ultra mikro (UMi) dan penyaluran kredit ultra mikro memiliki pengaruh positif untuk menanggulangi kemiskinan dan dampak lanjutannya.

## **Daftar Pustaka**

- Adams, F., & Atmanti, H. D. (2021). Analisis pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan di 6 Provinsi di Pulau Jawa. *Jurnal Studi Manajemen dan Riset Terapan*, 1(1), 01-08.
- Hasibuan, M. (2017). *Dasar-dasar perbankan*, Cetakan kesebelas. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hati, G., (2020). Refleksi implementasi program pengembangan kredit usaha mikro bagi komunitas miskin perkotaan. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 49(1), 105-124.
- Jordan, G. (2004). The cause of poverty, cultural vs structural: Can there be an synthesis?". *Perspective in Public Affairs*. 18-34.
- Lister, Ruth. (2010). *Poverty*. Cambridge: Polity Press.
- Musiyam, M. (1992). Kemiskinan di Indonesia; Konsep, pendekatan dan strategi pengentasan". *Forum Geografi*. 11, 61-67.
- Nazir, M. (2005). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
- Rahayu, E. (2018). Kemiskinan dan keuangan mikro. *Sosio Informa*, 4(01), 388-400
- Saleh, Y. & Hidayat, Y. (2011) Strategi pengembangan lembaga keuangan mikro mendukung pengentasan kemiskinan di perdesaan. *Mediagro*, 7(1), 68-81.
- Saunders, P. (2005). *The poverty wars*. Sydney: University of New South Wales Press Ltd.
- Sekaran, U. (2010). *Metode penelitian untuk bisnis*. Jakarta: Karya Salemba Empat.
- Setyawan, S., & Iswanaji, C. (2021). Peran *baitul mall wattamwil* sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 9(2), 183-191.

- Spicker, P. (2007). Definition of poverty: Twelve Cluster of Meaning. *Poverty: An International Glossary*.
- Spicker, P. (2014). *Social policy; Theory and practice*. 3<sup>rd</sup> edition. United Kingdom: Bristol University Press.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi (Penyunting). (1995). *Kemiskinan di perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suriadi, I., Hailuddin., & Sriningsih, S., (2021). Model pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dalam mengurai kemiskinan di Kota Mataram. *Ekonobis*, 7(1), 82-105.
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(3), 121-129.
- Tambunan, T. T. H., (2012). "The role of micro and small enterprise in regional poverty allevation. *Jurnal Bina Praja*, 4(2), 73-92.
- Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Weil, Marie., Michael, R., & Mary L, O. (Editor). (2013). *The Handbook of Community Practice*. USA: SAGE Publication, Inc.
- Wijono, W. (2005). Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya konkrit memutus rantai kemiskinan. Kajian ekonomi dan keuangan (Edisi Khusus). Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional. Departemen Keuangan.